

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LESABE KECAMATAN TABUKAN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE¹

Oleh : Arthur T. Lomboh²

ABSTRAK

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat.

Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, tumbuh berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan dalam setiap pembangunan.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan cita-cita yang mulia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 “untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” tidak akan dapat tercapai tanpa di dorong oleh sumber daya manusia yang bermutu agar dapat menunjang pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kemakmuran rakyat, kesehatan dan pendidikan yang tinggi, sehingga memungkinkan mutu kehidupan kenegaraan meningkat, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintah dan koordinasi masyarakat secara efektif dan efisien.

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Dewasa ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan nasional. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung seragam mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah.

Perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu:

1. Pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan).
2. Pemerintah daerah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal).

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa.

Seperti yang terjadi di Desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju kearah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan desa. Peran pemerintah desa sudah dikatakan baik terutama dalam masalah pembangunan desa, dimana pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya agar pembangunan di desa dapat berkembang dan menuju kearah yang lebih baik melalui berbagai macam cara, seperti melalui musyawarah perencanaan pembanguana desa sehingga menghasilkan berbagai program-program pembangunan, melalui komunikasi politik dengan pemerintah daerah untuk suatu kegiatan pembangunan. Tetapi tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa Lesabe, maka akan mengalami hambatan, bahkan tidak akan dapat terwujud atau dikatakan tidak berhasil, Karena terdapat beberapa kondisi dan keadaan masyarakat desa Lesabe yang menolak untuk berpartisipasi bahkan mengatakan tidak mau terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam kegiatan pembangunan desa. Seharusnya sebagai masyarakat yang tinggal atau berdomisili di desa Lesabe harus berpartisipasi dalam pembangunan desa, mengingat bahwa kegiatan pembangunan di desa bukan untuk kepentingan

beberapa orang atau sekelompok orang saja melainkan untuk kepentingan dan kebutuhan banyak orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah yaitu:

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Aspek Teoritis atau aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan partisipasi dalam pembangunan Desa.
2. Dari aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi Pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam meningkatkan pembangunan di daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi

Verhagen menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

1. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki.
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbang-an yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.(1979, Aprilia Theresia, Krisnha S. Andini dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat:197)

B. Konsep Masyarakat

Masyarakat adalah istilah paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang

berarti “ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (2009, Koentjaraningrat, Pegantar Ilmu Antropologi:118)

C. Konsep Pembangunan Desa

Menurut Soedjono Hoemardani, pembangunan memiliki pengertian adanya suatu usaha untuk memperkembangkan dan memperbaharu, mengganti yang tidak atau yang kurang baik dengan yang baik, membuat yang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik diusahakan menjadi lebih baik.(1981,Wawasan Budaya untuk Pembangunan:161)

Dalam undang-undang No. 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negar Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi rakyat, terutama rakyat perdesaan, dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, ialah:

1. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus.
2. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang untuk menjawab dan mencari pemecahan mengenai suatu permasalahan, dalam mencari pemecahan masalah mengenai penelitian ini maka peneliti menggunakan metode penelitian *kualitatif*.

Menurut pendapat Taylor dan Bogdan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.(1984,,Bagong Suyanto, Sutinah dkk, Metode Penelitian Sosial:166)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Indikator Partisipasi didasarkan pada 3 kriteria:

1. Kewenangan
2. Tanggung jawan
3. Manfaat

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten KepulauanSangihe.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|------------------------------|---------|
| a. Kepala Desa | 1 Orang |
| b. Kepala Urusan Pembangunan | 1 Orang |
| c. Tokoh-tokoh masyarakat | 2 Orang |
| d. Masyarakat Desa | 7 Orang |

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut. Apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjarangan informasi akan diakhiri.

2. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Observasi (pengamatan lapangan)

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada lapangan.

Proses pengolahan data bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi

data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasakan masih kurang mantap, maka dilakukan penggalan data kembali. Hal tersebut dilakukan secara berlanjut, sampai penarikan kesimpulan dirasa sudah cukup untuk menggambarkan dan menjawab fokus penelitian. Secara sistematis penjelasan mengenai reduksi data, penyajian data dan verifikasi sebagai berikut:

1. Reduksi data, sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dimana data itu disederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan menurut Moleong, analisis data adalah Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian di atas merupakan pengkajian dan penelitian yang penulis lakukan selama kurun waktu satu bulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mencari tahu sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa lesabe kecamatan tabukan selatan kabupaten kepulauan sangihe.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin mengharuskan setiap elemen masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri, berfikir kritis dan bertindak global agar tidak di telan jaman. Seperti sebuah falsafah kuno Italia yaitu "*siapa yang menolak peradaban maka dia di takdirkan untuk punah*". Indonesia sebagai negara yang telah memberikan kewenangan dan kebebasan kepada setiap desa untuk dapat mengelola seluruh sumber daya alam yang ada di desa, maka dari itu partisipasi masyarakat untuk setiap pembangunan menjadi unsur yang paling penting dalam menunjang terlaksananya keberhasilan desa, sebab apabila desa dikatakan berhasil maka negara juga bisa dikatakan berhasil.

Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa lesabe kecamatan tabukan selatan kabupaten kepulauan sangihe, penulis menggunakan indikator partisipasi menurut Verhangen (1979, Aprilia Theresia,

Krisnha S. Andini dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat:197*), ada 3 indikator, yaitu:

1. Kewenangan

Dalam pelaksanaannya pemerintah desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan baik ketika kewenangan pemerintah desa dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif berjalan sebagaimana yang diharapkan, untuk itu setelah kewenangan pemerintah dijalankan terhadap pembangunan desa, masyarakat juga harus mengambil bagian atau ikutserta dalam proses pembangunan desa, karena keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa.

Menurut informan S.L selaku kepala desa, dengan pendidikan terakhir SMA, usia 47 tahun, menyatakan bahwa: *“secara umum masyarakat desa lesabe sangat menyadari betapa penting partisipasinya sebagai agen perubahan untuk dapat membantu pemerintah desa terlebih khusus dalam pembangunan desa, karena di satu sisi mereka adalah pejuang bagi desa guna menunjang perkembangan dan pembangunan desa. Masyarakat sangat antusias dalam merespon setiap pembangunan di desa yang telah kami sediakan atau siap untuk dilaksanakan dari hasil yang sudah terprogram dalam musyawarah rencana pembangunan desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan kepada kami selaku pemerintah desa agar dapat melaksanakan pembangunan desa, mereka juga rela memberikan sumbangsi baik dalam bentuk pikiran, fisik, finansial maupun fasilitas yang dimilikinya semata-mata demi keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat desa lesabe terutama dalam pembangunan-pembangunan yang ada di desa. Namun di sisi lain ada beberapa masyarakat yang masih kurang menyadari betapa pentingnya partisipasi mereka sebagai garda terdepan untuk menunjang terlaksananya setiap pembangunan desa sehingga masih bersikap apatis dan masa bodoh terhadap setiap kebijakan dalam pembangunan yang ada di desa.”*

Secara garis besar kewenangan dari pemerintah desa telah berjalan dengan baik, pemerintah desa melalui program yang sudah ditetapkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa maupun rencana pembangunan jangka menengah desa telah semaksimal mungkin menjalankan amanah yang telah dipercayakan dalam melaksanakan pembangunan desa.

2. Tanggung Jawab

Dalam kegiatan pembangunan desa, untuk menunjang keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah desa saja tetapi juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat, dalam hal ini merupakan tanggung jawab bersama sebab pemerintahan tanpa adanya keterlibatan masyarakat bukanlah sebuah pemerintahan.

Menurut informan W.M, dengan pendidikan terakhir S1, usia 51 tahun, mengatakan bahwa: *“peran dan partisipasi masyarakat di desa lesabe sejauh ini sangat loyal terhadap setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa. karena selain pemerintah desa setiap aktifitas yang dilaksanan turut melibatkan setiap lapisan masyarakat. Masyarakat sadar bahwa dalam pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama, masyarakat punya peran yang cukup besar dalam kegiatan pembangunan guna kebutuhan dan kepentingan yang sama demi kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan dalam pembangunan desa. Namun tidak bisa di pungkiri ada sebagian masyarakat yang tidak peka dan keinginan untuk tidak mau melibatkan dirinya secara proaktif dalam setiap pembangunan desa baik tenaga maupun fasilitas.”*

Secara garis besar, pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah desa maupun masyarakat, pemerintah tidak dapat bekerja tanpa bantuan dan keterlibatan masyarakat, begitu juga masyarakat membutuhkan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

3. Manfaat

Setiap kegiatan pembangunan desa, diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu manfaat dari pembangunan desa merupakan penentu atau akhir dari proses keikutsertaan masyarakat guna mencapai keberhasilan pembangunan desa.

Menurut informan J.L, dengan pendidikan terakhir SMA, usia 54 tahun, menyatakan bahwa: *“partisipasi masyarakat desa lesabe terhadap pembangunan desa terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berpartisipasi atas keinginannya sendiri dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang berpartisipasi tapi mengharapkan upah kerja. Jadi dapat di gambarkan bahwa kelompok yang pertama adalah kelompok yang memiliki nilai-nilai gotong royong, bahu-membahu dan rela berkorban untuk pembangunan demi tercapainya tatanan masyarakat. Sadar akan diri dan tanggung jawabnya sebagai mahluk sosial yang hidup untuk saling membantu dan mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Sedangkan kelompok kedua adalah segelintir orang-orang yang hanya mementingkan rasa ego yang tinggi akibat kurang di dasari dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat yang telah lama ada dan tertanan dalam diri setiap masyarakat desa, masyarakat kelompok kedua harus lebih memahami dan menyadari bahwa apa yang mereka pikirkan dan lakukan tidak sesuai dengan cara hidup bermasyarakat, sebagai masyarakat yang tinggal atau berdomisili di desa lesabe harus menyadari bahwa yang berkaitan dengan kepentingan bersama harus di dukung, karena setiap kebijakan dalam pembangunan di desa adalah untuk kepentingan semua masyarakat di desa dan yang akan menerima manfaat dari pembangunan yang ada di desa adalah semua masyarakat mulai dari anak kecil sampai orang dewasa.”*

Secara garis besar, bahwa manfaat dari pembangunan adalah untuk semua masyarakat tanpa memandang status, jabatan, golongan, umur dan lain sebagainya,

karena pada hakekatnya manfaat dari pembangunan desa adalah untuk kepentingan bersama.

Proses pembangunan tidak berjalan secara parsial, tapi merupakan satu kesatuan terpadu antara partisipasi masyarakat dan pembangunan karena kedua komponen ini merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sisi yang satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat, masyarakat sebagai kunci penentuan keberhasilan desa. Artinya, melalui partisipasi yang di berikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa semata tetapi menuntut keterlibatan masyarakat secara total agar dapat tercapai dan menyentuh falsafah bangsa Indonesia yaitu sila kelima pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara empiris sesuai dengan apa yang penulis temukan di lokasi penelitian, dimana sebagian besar masyarakatnya berpartisipasi secara sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan atau dorongan dari pihak lain. Keikutsertaan masyarakat yang datang secara sukarela untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan, peluang dan kesempatan yang di berikan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan sangat besar. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan aparat desa dalam hal ini pemerintah desa bahwa masyarakat bukan sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan semata, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat di andalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sesuai dengan fokus penelitian maka penulis menarik kesimpulan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe:

1. Dalam pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh satu komponen saja. Artinya, dalam pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemerintah desa semata, tetapi juga menuntut keterlibatan atau partisipasi masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, secara umum partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan

kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.
4. Setiap pembangunan di desa harus melibatkan masyarakat mulai dari proses pembahasan program pembangunan sampai dengan evaluasi, sebab yang harus menerima manfaat dari setiap pembangunan di desa adalah semua masyarakat.

B. Saran

Masyarakat Desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu merubah paradigma dan lebih menyadari bahwa begitu pentingnya partisipasi dalam setiap proses pembangunan desa guna keberhasilan pembangunan, oleh karena itu saran dari penulis:

1. Diharapkan masyarakat dapat merubah kerangka berpikir untuk lebih meningkatkan partisipasi khususnya dalam setiap pembangunan guna menunjang setiap program pemerintah desa yang sudah ditetapkan.
2. Diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari betapa pentingnya partisipasi dalam pembangunan di desa.
3. Diharapkan pemerintah desa dapat membangun proses kesadaran kepada sebagian masyarakat yang tidak mau terlibat dalam proses pembangunan sehingga ikut terlibat atau menjadi aktif berpartisipasi dalam setiap pembangunan desa, melalui sosialisasi kepada masyarakat.
4. Masyarakat harus memegang prinsip bahwa sebagai makhluk sosial, tidak pernah terlepas dari yang namanya hidup saling membutuhkan karena keterbatasan bukan menjadi suatu batasan dalam bernasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2010. *Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru*. Yogyakarta: TICI Publications.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza, 2012. *Political explore*. Bandung: Alfabeta.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Hamzah, Fahri. 2011. *Negara, Pasar dan Rakyat*. Penerbit: Yayasan Faham Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1974. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nugroho, Irwan dan Rokhmin Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, M Dawam. 2010. *Ekonomi Politik Pembangunan*. Jakarta: Fadli Zon Library.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Aditama.
- Sjafrizal, 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjatmiko, Budiman dan Yando Zakaria. 2014. *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Suyanto, Bagong dkk. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tarigin, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Theresia, Aprilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tim PUSGAR, 2004. *Wawasan Budaya untuk Pembangunan*. Yogyakarta: Pilar Politika.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kamus Ilmiah Populer.

Referensi Lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.